

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim*

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategik 2019 - 2024 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin,

Amin, Ya Robbal Alamin.

Bekasi, 27 Desember 2019  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
KOTA BEKASI



**FERRY LUMBAN GAOL, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19630329 199403 1 005

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i Daftar Isi
.....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
1.2    Aspek Strategis Organisasi .....	2
1.3    Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	3
1.4    Struktur Organisasi.....	6
1.5    Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1    Perjanjian Kinerja .....	11
2.2    Rencana Strategis .....	12
2.3    Visi dan Misi .....	13
2.4    Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan.....	13
2.5    Indikator Kinerja Utama.....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1    Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
3.2    Realisasi Anggaran.....	27
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>38</b>



## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“, yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Perpustakaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota Bekasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pengembangan perpustakaan dan minat baca di Kota Bekasi. Selain itu, juga memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perpustakaan serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan strategis yang ditetapkan. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Dinas Perpustakaan ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui penyediaan bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kota Bekasi masih belum tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga perpustakaan Kota Bekasi diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat.

BAB | Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan**

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang perpustakaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok :

##### **“Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan”**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

##### **ISU INTERNAL**

##### **1) Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.**

Salah satu modal utama pengembangan perpustakaan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Perpustakaan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang Perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan maupun seminar, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional Pustakawan.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), peran sosial (*social role*), citra diri (*self-image*), perilaku (*behave*), dan motivasi (*motive*) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (*knowledge*) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan dan penyelenggaraan perpustakaan.

## **2) Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis**

Pengembangan perpustakaan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan *stakeholders* dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pengembangan perpustakaan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan perpustakaan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku perpustakaan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan layanan perpustakaan perlu dilakukan program-program pembangunan lebih terpadu dan terintegrasi. Seperti halnya program layanan perpustakaan keliling guna meningkatkan budaya baca masyarakat, sehingga pihak terkait baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan fungsi perpustakaan.

## **3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan**

Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan mampu berperan sebagai lembaga dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bekasi. Namun di sisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor.

## **ISU EKSTERNAL**

### 1) Rendahnya Minat Baca Masyarakat

Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling.

### 2) Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data yang valid dan akurat.

Keberadaan database perpustakaan sangat tepat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga, belum bisa di akses oleh khalayak umum. Sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung system informasi lainnya. Oleh karena itu, diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan guna teknologi informasi perpustakaan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.

### C. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan

Dinas Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dituntut untuk dapat mendukung terlaksananya program Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Visi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 "**Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**" melalui misi ke 4 yaitu "**Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif**". Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, tujuan dan sasaran keberadaan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah "**Mewujudkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi**" melalui pemberdayaan perpustakaan. Dengan "**Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan yang Prima**"

### 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi berdiri sendiri pada Tahun 2017 sesuai amanat permendagri nomor 18 tentang Perangkat Daerah, sebelumnya bergabung dalam Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi. semenjak berdiri sendiri menjadi dinas berimbas terhadap kewenangan yang semakin meluas. Kewenangannya bertambah tidak hanya mengelola Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tetapi juga mengembangkan perpustakaan yang ada di Kota Bekasi.

Berdasarkan data yang ada, potensi perpustakaan yang ada di Kota Bekasi cukup banyak meliputi Perpustakaan Kecamatan sebanyak 12 kecamatan, Perpustakaan Kelurahan sebanyak 56 kelurahan, Perpustakaan masyarakat yang terdiri dari TBM, perpustakaan Kampung KB dan rumah Pintar sebanyak 64 perpustakaan, perangkat daerah yang telah bekerja sama dengan perpustakaan Kota Bekasi sebanyak 6 Perangkat Daerah, dari 675 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang ada di Kota Bekasi terdapat 414 sekolah yang memiliki perpustakaan namun baru 167 yang aktif, sedangkan sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kota Bekasi sebanyak 271 SMP Negeri dan Swasta baru 211 sekolah yang memiliki perpustakaan dan dari jumlah tersebut yang aktif baru 156 sekolah.

Potensi berkembangnya perpustakaan juga dimungkinkan di tengah aktivitas masyarakat dalam bentuk komunitas. Masyarakat melalui kelompok profesi, kelompok minat, kelompok kepentingan dan kelompok lainnya dapat membentuk perpustakaan komunitas. Potensi berkembangnya perpustakaan komunitas ini cukup besar seiring dengan makin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kelompoknya, misalnya Perpustakaan Jalanan.

Potensi pendirian dan pengembangan perpustakaan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi. Perhatian pemerintah terhadap perpustakaan tidak hanya pada tataran regulasi tetapi juga harus diimbangi pada tahap implementasi berkembangnya perpustakaan. Sementara itu, masyarakat selain sebagai pengguna potensial perpustakaan juga dapat berperan serta menciptakan situasi yang kondusif untuk tumbuh kembangnya perpustakaan.

### **1.3. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi**

Melihat potensi yang ada seharusnya pertumbuhan perpustakaan di Kota Bekasi dapat ditingkatkan lebih banyak lagi baik secara kuantitatif berupa pendirian perpustakaan baru maupun secara kualitatif dengan meningkatkan mutu penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, antara lain:

1. Sumber daya pengelola perpustakaan yang masih kurang karena belum adanya kebijakan pengangkatan/formasi pegawai baru dengan latar belakang ilmu perpustakaan sehingga penyelenggaraan perpustakaan ditangani oleh orang yang belum memiliki kompetensi di bidang perpustakaan;

2. Eksistensi pendanaan perpustakaan masih mengandalkan APBD Kota Bekasi;
3. Mobilitas mutasi/pergantian pimpinan sangat cepat sehingga kurang mendukung percepatan program pembangunan perpustakaan dan minat baca;
4. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas;

#### **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi;



## PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan sinkronisasi dengan Renstra Perpustakaan Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dan *stakeholder*.

#### 1. Visi dan Misi

Mengacu pada Visi Kota Bekasi “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” Dinas Perpustakaan Kota Bekasi hadir untuk membantu Wali Kota Bekasi mencapai Visi “Cerdas” dan menjalankan Misi ke-4 “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif”. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dengan sasaran tercapainya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif.

Dinas Perpustakaan Kota Perpustakaan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Bekasi tersebut di atas. Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berpengetahuan. Selain itu perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting dalam mendukung pendidikan seumur hidup (*life long education*) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat Kota Bekasi perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat mempunyai peran dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan bahan pustaka terkait ilmu murni, ilmu terapan, sastra dan literature lainnya. Perpustakaan merupakan lembaga yang mampu memastikan setiap masyarakat memperoleh akses pengetahuan secara terbuka dimana dan kapan pun mereka berada.

Seiring dengan adanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam rangka menyesuaikan diri dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka perpustakaan tidak hanya sekedar melayani pinjam buku dan penyediaan layanan internet saja, melainkan aktif menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder lain. Adapun kegiatan yang bisa dilaksanakan di perpustakaan berupa pelatihan berbagai macam keterampilan ataupun sosialisasi / penyuluhan berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadikannya mandiri dan sejahtera.

Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat Perpengetahuan (*Knowledge society*) melalui ikhtiar kolektif, untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat:

- Masyarakat berpengetahuan merupakan bagian dari lapisan *critical mass* yang menjadi fondasi sosial sangat kokoh, untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang maju;
- Masyarakat berpengetahuan merupakan penjelmaan suatu bangsa dengan capaian peradaban tinggi

- Masyarakat berpengetahuan selalu bersikap terbuka, adaptif, bersedia menerima ide-ide baru berasal dari mana pun, yang mengantarkan pada perubahan dan kemajuan;
- Masyarakat berpengetahuan lebih mudah menerima keragaman dan perbedaan, serta menghargai pluralitas dan multikulturalisme di masyarakat – cerminan dari watak kosmopolitanisme;

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Untuk mencapai tujuan Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan menetapkan tujuan **“Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi”**. Dengan meningkatnya minat baca masyarakat kota Bekasi, masyarakat lebih literate sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Sasaran yang ingin dicapai Kota Bekasi dalam mencapai tujuan 4.1 adalah **“Tercapainya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif”**. Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas perpustakaan menetapkan sasaran **“Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi”** dengan indikator sasaran tersebut yaitu Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi.

Minat baca masyarakat dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi pada masyarakat terhadap sumber bacaan tertentu dan ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Untuk mengukur tingkat kebiasaan membaca masyarakat, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi. Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Membaca Masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi yaitu :

1. Ketersediaan fasilitas membaca, ketersediaan fasilitas dapat diukur dari ketersediaan perpustakaan sekolah dan ketersediaan perpustakaan umum – termasuk perpustakaan kecamatan dan kelurahan, taman bacaan masyarakat.
2. Tingkat pemanfaatan sumber bacaan, dilihat dari rata-rata jumlah kepemilikan bahan bacaan, jumlah bahan bacaan, pemanfaatan bahan bacaan dan kunjungan ke perpustakaan.
3. Kebiasaan membaca masyarakat, diukur dari rata-rata durasi membaca, frekuensi membaca dan tujuan membaca

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu hasil penghitungan survey tersebut diolah dan keluarlah nilai indeks kepuasan masyarakat yang dapat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun target dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel dibawah ini

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi  
Tahun 2019-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota	60	65	70	75	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kota	75	77	78	79	80

**3. Sasaran Program**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran program untuk pencapaian tujuan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi periode 2018-2023, sebagai berikut :

- a. Sasaran Program pertama (SP1) yang akan dicapai Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dengan indikator kinerja:
  - Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan dengan target 35%
  - Persentase Perpustakaan yang Terintegrasi Sistem Perpustakaan dengan target 2%
  - Persentase Keanekaragaman Koleksi dengan target 30%
- b. Sasaran Program kedua (SP2) yang akan dicapai Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah Tercapainya pembudayaan gemar membaca dengan indikator kinerja :

- Persentase Perpustakaan Yang Aktif dengan target 2%

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	60	65	70	75	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi	75	77	78	79	80

#### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi urusan wajib non pelayanan pada bidang Perpustakaan Yaitu: Program Pengembangan Perpustakaan dan Program Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Program pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

**Sasaran strategis yaitu Meningkatkan Minat Baca Masyarakat**, indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Indeks Membaca Masyarakat” dengan target kinerja akhir tahun 2019 adalah 60 dan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target kinerja akhir tahun 2019 adalah 75.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi melaksanakan 6 (enam) program sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	JUMLAH KEGIATAN
1	Program Pengembangan Perpustakaan	Rp.191.200.000,-	1
2	Program Pembudayaan Gemar Membaca	Rp. 0,-	0
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.015.096.000 ,-	12
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 390.000.0000,-	3
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 20.000.000,-	1
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000,-	1

Penetapan atau perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Perpustakaan merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

**Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------	----------------	----------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Nilai	60	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	60
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi	Nilai	75	Triwulan I	
					Triwulan II	75
					Triwulan III	
					Triwulan IV	75



## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran utama program dan kegiatan periode tahun 2019 Dinas Perpustakaan Kota Bekasi masih terfokus pada peningkatan minat baca masyarakat melalui pengembangan berbagai jenis perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang berlandaskan pada kebijakan program dan kegiatan yang telah diwujudkan dengan berbagai aktivitas yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung serta berkelanjutan dengan peningkatan minat membaca masyarakat sebagai upaya menciptakan eksistensi perpustakaan dalam rangka pemulihan citra positif perpustakaan di tengah masyarakat.

Keberhasilan kinerja didasarkan pada pengukuran dan penilaian dari rencana kinerja dan target yang ingin dicapai. Pengukuran juga dilakukan untuk melihat secara langsung dampak yang telah ditimbulkan oleh kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan capaian kinerja (performance result) berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan penilaian ini disusun dalam bentuk prosentase yang digambarkan secara kualitatif dan kuantitatif. Capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 dapat diuraikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2019  
Dinas Perpustakaan Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	60	54,08	90.13%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi	75	74,36	99,14%

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2019 dengan baik dilihat nilai capaian kinerja dari target yang ditetapkan untuk tiap indikator sasaran dengan persentase sebesar 94,63%

Uraian dari capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

### 1. Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi

Nilai capaian tahun 2019 belum dapat kami sajikan dikarenakan tidak adanya kegiatan untuk penyusunan indeks membaca masyarakat kota bekasi pada tahun 2019. Adapun nilai yang kami sajikan dalam laporan ini merupakan nilai indeks Tahun 2017 yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Universitas Padjadjaran.

Nilai indeks tahun 2017 berdasarkan kepada data hasil perhitungan indeks membaca masyarakat didasarkan pada indikator rata-rata ketersediaan fasilitas membaca, tingkat pemanfaatan bahan bacaan, dan kebiasaan membaca masyarakat, maka indeks membaca masyarakat kota bekasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{50.85 + 60.91 + 58.48}{3}$$

$$X = 54.08$$

Berdasarkan kepada hasil perhitungan indeks di atas, maka indeks membaca masyarakat Kota Bekasi adalah 54.08. Berdasarkan kepada skala pengukuran indeks membaca yang telah ditetapkan maka angka 54.08 masuk pada kategori CUKUP.

### 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi

Pelaksanaan penilaian SKM Semester II pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi diperoleh hasil nilai rata-rata **74,36 (Kurang Baik)** Perhitungan unsur pelayanan tersebut merupakan dasar analisis terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Perhitungan indeks tersebut dilakukan dengan menghitung rata-rata lalu dikonversikan kepada angka indeks sesuai dengan ketentuan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat.

Adapun analisis atas hasil Analisa dan pengukuran perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan perpustakaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Penilaian Pada Pelayanan Perpustakaan Kota Bekasi

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
<b>74,365</b>	U1	Persyaratan	2.958	0.325
	U2	Prosedur	3.083	0.339
	U3	Kecepatan	2.900	0.319
	U4	Kenyamanan Lingkungan	3.033	0.334
	U5	Produk Layanan	2.925	0.322
	U6	Kompetensi Pelaksana	2.958	0.325
	U7	Perilaku Pelaksana	3.225	0.355
	U8	Sarana dan Prasarana	2.725	0.300
	U9	Penanganan pengaduan saran dan Masukan	3.233	0.356
		<b>Jumlah</b>		<b>27,042</b>

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar **74,36**. Nilai tersebut menunjukkan kinerja unit pelayanan perpustakaan Kota Bekasi berada dalam mutu pelayanan **C** dengan kategori **Kurang Baik**, karena berada dalam nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat **65,00 – 76,60**.

Dari table 2.1 diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai rata-rata (NRR) **tertinggi** adalah unsur **Perilaku Petugas Pelayanan (3.225)**. Unsur pelayanan yang nilai rata-ratanya **terendah** dibandingkan unsur pelayanan lainnya, yaitu **unsur sarana dan prasarana** yang memiliki nilai rata-rata **2.725**. hal ini dikarenakan kondisi Gedung layanan perpustakaan yang belum representative untuk pemustaka, lokasinya yang kurang strategis sehingga masyarakat kesulitan menemukan lokasi perpustakaan, koleksi buku yang kurang update sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan koneksi internet yang kurang stabil. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana yang berada di Dinas Perpustakaan.

## **B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pengukuran/penentuan dilakukan supaya tingkat efektivitas yang antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dapat sesuai. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 4 indikator kinerja program dari 2 Program, sebagaimana telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Bekasi pada tahun 2018.

#### A. Sasaran Program 1 : Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya pengembangan perpustakaan dengan 3 (tiga) indikator program sebagai berikut :

- Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan dengan target kinerja sebesar 35% yang dihitung dari jumlah pengunjung perpustakaan Kota Bekasi dan Pengunjung perpustakaan keliling. Dengan rumusan

$$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun N} - \text{Jumlah Pengunjung (N-1)}}{\text{Jumlah Pengunjung (N-1)}} \times 100$$

NO	URAIAN	2018	2019	CAPAIAN
1	Pengunjung Perpustakaan Kota Bekasi	7.122 Pengunjung	8.403 Pengunjung	17,98%
2	Pengunjung Perpustakaan Keliling	8.127 Pengunjung	806 Pengunjung	-90,08%
<b>JUMLAH</b>		<b>15.249</b> <b>Pengunjung</b>	<b>9209</b> <b>Pengunjung</b>	<b>-39,61%</b>

Tabel diatas memperlihatkan capaian kinerja nyata sebesar -39,61%. Indikator kinerja ini didukung kegiatan Perpustakaan keliling dengan pagu anggaran Rp.191.200.000,- dengan output 75 titik layanan perpustakaan keliling dengan realisasi 35 titik layanan perpustakaan keliling serta didukung dari pengunjung Perpustakaan Kota Bekasi yang berada Jl. Rawa Tembaga No. 3 Bekasi Selatan.

Capaian indikator program peningkatan pengunjung perpustakaan tahun 2019 sebesar -39,61% sangat kurang dikarenakan vacuumnya beberapa kegiatan yang diagendakan pelaksanaannya di Perpustakaan Kota Bekasi dan tidak berjalannya kegiatan perpustakaan keliling.

- Persentase Perpustakaan Yang Terintegrasi Sistem Perpustakaan dengan target kinerja sebesar 2% dari jumlah perpustakaan yang aktif atau sebanyak 13 perpustakaan. Batasan definisi perpustakaan yang terintegrasi sistem perpustakaan adalah perpustakaan di Kota Bekasi menggunakan sistem perpustakaan yang terintegrasi antara pengolahan bahan pustaka dengan pelayanan pemustaka sehingga mempermudah administrasi pengelolaan perpustakaan dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan. Capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Perpustakaan Yang Terintegrasi Sistem Perpustakaan	2% 13 Perpustakaan	1,08% 7 Perpustakaan	46,15%

Indikator program ini tidak didukung dengan kegiatan berbasis anggaran. Capaian indikator sebesar 46,15% didapatkan dengan upaya mendatangi perpustakaan yang berada disekolah secara mandiri, kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan meminta data sekolah yang memungkinkan sarana dan prasarana pendukung untuk kami datangi dan latih sistem perpustakaan aplikasi Inlislite yang didapatkan dari Perpunas RI. Dengan segala keterbatasan yang ada kami hanya dapat melatih 7 sekolah dan masih perlu kami lakukan monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan penginputan dan pemanfaatan sistem perpustakaan.

- Persentase Keanekaragaman Koleksi dengan target kinerja Tahun 2019 sebesar 30% dengan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah Judul Buku}}{\text{Jumlah Eksemplar}} \times 100$$

Capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Keanekaragaman Koleksi	30%	29,58%	98,6%

Capaian indikator program ini tidak didukung dengan kegiatan berbasis anggaran. Capaian indikator sebesar 98,6% diperoleh melalui hibah dari beberapa sumber seperti Gramedia Metropolitan Mall, BI Corner serta OPD. Hibah itu kami lakukan dengan melakukan pendekatan dengan Gramedia dan pengusulan proposal ke Bank Indonesia serta membuat Instruksi Wali Kota Bekasi agar setiap perangkat daerah memberikan buku sebagai upaya penambahan koleksi perpustakaan. Tahun 2019 terdapat

penambahan 505 Judul Buku 586 Eksemplar sehingga total keseluruhan sebanyak 15.037 Judul Buku dan 50.839 eksemplar.

## **B. Sasaran Program 2 : Tercapainya Pembudayaan Kegemaran Membaca**

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran tercapainya pembudayaan kegemaran membaca diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu :

- Persentase Perpustakaan Yang Aktif dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 2%. Tugas dari indikator ini adalah meningkatkan keaktifan perpustakaan yang ada sehingga dapat membantu tugas Dinas Perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca kembali. Kategori aktif perpustakaan adalah memiliki pengelola perpustakaan sendiri, memiliki ruangan perpustakaan tersendiri, memiliki kegiatan literasi yang rutin dilaksanakan. Capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Perpustakaan yang aktif	2% 13 Perpustakaan	1,23% 8 Perpustakaan	61,5%

Indikator program ini tidak didukung dengan kegiatan berbasis anggaran. Capaian indikator sebesar 61,5% didapatkan dengan upaya mendatangi perpustakaan yang berada disekolah secara mandiri, Dinas Perpustakaan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mendatangi perpustakaan sekolah yang belum aktif guna diberikan pelatihan tentang administrasi pengelolaan perpustakaan serta arahan tentang berbagai macam kegiatan literasi yang dapat dilakukan di sekolah. Selain itu Dinas Perpustakaan juga mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi tentang pemberdayaan perpustakaan sekolah sebagai upaya peningkatan pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dari 10 perpustakaan sekolah yang Dinas Perpustakaan lakukan pembinaan pengaktifan perpustakaan, hanya ada 8 perpustakaan sekolah yang meningkat statusnya menjadi aktif sedangkan untuk 2 sekolah belum dapat berubah statusnya dikarenakan SDN Margajaya 2 tidak memiliki ruang perpustakaan tersendiri, masih bergabung dengan ruang kepala sekolah, UKS dan Laboratorium dan SDN Bekasi Jaya X yang telah di gabung dengan SDN Bekasi Jaya I

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 8.681.179.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.741.796.495,- atau 77,66% dari total pagu anggaran Dinas Perpustakaan

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran  
Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	Rp.6.962.598.000,-	Rp.5.752.763.149,-	Rp.1.209.834.851,-	82,62%
<b>b. Belanja Langsung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja Pegawai</li><li>• Belanja Barang dan Jasa</li><li>• Belanja Modal</li></ul>	Rp.1.715.561.000,-	Rp.986.013.346,-	Rp.729.547.654,-	61,18%
<b>BELANJA</b>	Rp.8.681.179.000,-	Rp.6.741.796.495,-	Rp.1.939.382.505,-	77,66%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran  
Dinas Perpustakaan Kota Bekasi  
Berdasarkan Program Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Perpustakaan	Rp.191.200.000,-	Rp.7.530.000,-
2	Program Pembudayaan Gemar Membaca	Rp. 0,-	0
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.015.096.000 ,-	Rp.748.208.046,-
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 390.000.0000,-	Rp.167.090.300,-

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 20.000.000,-	Rp.0
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 30.000.000,-	Rp.0



## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2019 serta merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perpustakaan Kota Bekasi. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. .

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 tidak berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang ingin dicapai terkendala dengan rasionalisasi anggaran yang disebabkan pendapatan daerah tidak berhasil mencapai target sehingga menjadi permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Dinas Perpustakaan berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi-nya Kota Bekasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 “**Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**”. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi secara keseluruhan dari Sasaran Strategis, dimana capaian sasaran tahun 2019 Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi sebesar 54,08 (masih data tahun 2017) dari target sebesar 60.

Dengan keterbatasan anggaran Dinas Perpustakaan tetap berupaya untuk mencapai sasaran meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa gerakan masif telah dilakukan seperti dengan berkerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pembinaan untuk pengelola perpustakaan dan pustakawan mendatangi langsung ke perpustakaan-perpustakaan sekolah dan masyarakat melakukan pembinaan sebagai salah satu upaya mencapai indikator program persentase perpustakaan yang aktif dan Persentase perpustakaan yang terintegrasi sistem perpustakaan.

Sedangkan pencapaian untuk persentase peningkatan jumlah pengunjung sangat rendah disebabkan karena beberapa kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di

perpustakaan batal pelaksanaannya serta kurangnya kunjungan perpustakaan keliling karena keterbatasan anggaran Kota Bekasi.

#### **A. Simpulan Capaian Kinerja**

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar Rp.8.681.179.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.6.962.598.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. Rp.1.715.561.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi keuangan 77,66%.

Capaian tersebut dipengaruhi rasionalisasi anggaran yang disebabkan pendapatan daerah tidak mencapai target pendapatannya. sehingga capaian kinerja Dinas Perpustakaan tidak memenuhi target.

#### **B. Rencana Tindak**

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada urusan wajib non pelayanan bidang perpustakaan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi.

Untuk mempercepat tercapainya visi, Dinas Perpustakaan perlu melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengembangan perpustakaan yang berada di sekolah baik pengembangan sarana, prasarana dan sumberdaya lainnya sebagai skala prioritas. Selain itu perlu diadakan gerakan penyadaran pentingnya membaca kepada masyarakat secara massif dan simultan melalui program gebyar membaca yang dimotori oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan.

Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan pada tahun 2019 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang, yaitu perpustakaan digital untuk mengikuti kemajuan teknologi dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Bekasi yang tidak dapat mengakses langsung Perpustakaan Kota Bekasi.